

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, dan hasil penerimaan pajak digunakan untuk mendanai program-program penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan bantuan sosial. Namun hal yang sering terjadi saat ini yaitu terjadinya defisit antara penerimaan pajak pemerintah dengan anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan belanja pemerintah seperti subsidi, investasi, fasilitas umum, dan lain-lain. Kondisi tersebut menyebabkan kurang efektifnya kebijakan penerimaan pajak pemerintah dan yang akan berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia yang melemah Dirjen Pajak (2024).

Dengan laporan penerimaan pajak, pemerintah dapat menilai efektivitas kebijakan perpajakan, mengidentifikasi sektor-sektor yang berkontribusi besar atau rendah terhadap penerimaan, serta menentukan strategi peningkatan pajak yang lebih tepat Dirjen Pajak (2024). Selain itu, laporan ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran negara. Dengan adanya laporan penerimaan pajak yang lengkap, pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa anggaran publik dikelola dengan baik. Laporan ini juga menjadi indikator kesehatan ekonomi; tingkat penerimaan pajak yang meningkat dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan penerimaan dapat menjadi sinyal adanya tantangan ekonomi yang perlu diperhatikan.

Dari sisi kebijakan, data dalam laporan penerimaan pajak membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi terkini. Hal ini memungkinkan penyesuaian alokasi anggaran dan prioritas belanja sesuai dengan kebutuhan. Pada akhirnya, laporan penerimaan pajak juga berguna sebagai panduan untuk perbaikan sistem perpajakan agar lebih efisien dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi ini meliputi penerimaan dari sektor perpajakan serta berbagai komponen pajak lainnya, termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai. Melalui data, diharapkan dapat dilihat pola pertumbuhan dan kontribusi masing-masing kategori terhadap pendapatan negara secara keseluruhan, yang merupakan indikator penting dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022-2024

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2006334	2630147	2634148,9
Penerimaan Perpajakan	1547841,1	2034552,5	2118348
Pajak Dalam Negeri	1474145,7	1943654,9	2045450
Pajak Penghasilan	696676,6	998213,8	1040798,4
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	551900,5	687609,5	742264,5
Cukai	18924,8	23264,7	25462,7
Pajak Lainnya	0	0	0
Pajak Perdagangan Internasional	195517,8	226880,8	227210
Bea Masuk	11126	7686,1	9714,4
Pajak Ekspor	73695,4	90897,6	72898
Penerimaan Bukan Pajak	39122,7	51077,7	53094
Penerimaan Sumber Daya Alam	34572,7	39819,9	19804
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	458493	595594,5	515800,9

			Lanjutan
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152504	196324,3	131493,6
Pendapatan Badan Layanan Umum	126002,8	89902,3	79459,4
II. Hibah	5013	5696,1	3100
Jumlah	2011347	2635843	2637249

Sumber: BPS, 2023

Tabel 1.1 menyajikan data realisasi pendapatan negara Indonesia dalam periode tahun 2021 hingga 2023, dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Pendapatan negara diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, mulai dari total penerimaan dalam negeri dan selanjutnya diuraikan menurut jenis penerimaan pajak dan komponen penyusunnya.

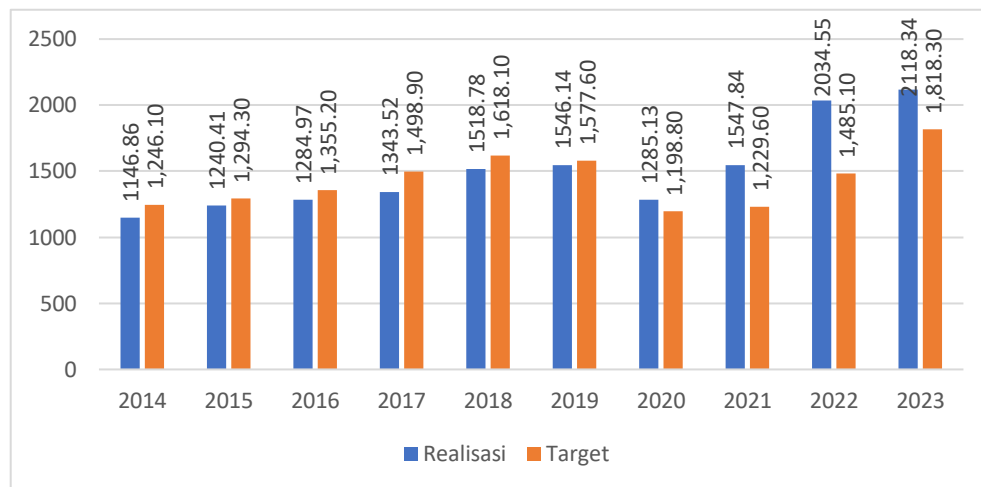
Pada tahun 2021, realisasi total Penerimaan Dalam Negeri tercatat sebesar 2.006.334 miliar rupiah. Angka ini meningkat signifikan menjadi 2.630.147 miliar rupiah pada tahun 2022, dan sedikit naik menjadi 2.634.148,9 miliar rupiah pada tahun 2023. Komponen terbesar dari penerimaan dalam negeri berasal dari sektor Penerimaan Perpajakan, yang mencapai 1.547.841,1 miliar rupiah pada tahun 2021, meningkat menjadi 2.034.552,5 miliar rupiah di tahun 2022, dan terus bertumbuh menjadi 2.118.348 miliar rupiah pada tahun 2023.

Kontributor utama dalam penerimaan perpajakan adalah Pajak Dalam Negeri, dengan nilai sebesar 1.474.145,7 miliar rupiah pada tahun 2021, naik menjadi 1.943.654,9 miliar rupiah di tahun 2022, dan bertambah lagi menjadi 2.045.450 miliar rupiah pada 2023. Komponen terbesar dari Pajak Dalam Negeri adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang meningkat secara konsisten dari 696.676,6 miliar rupiah di tahun 2021 menjadi 998.213,8 miliar rupiah di tahun 2022, dan mencapai 1.040.798,4 miliar rupiah pada tahun 2023.

Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga mengalami kenaikan signifikan dari 551.900,5 miliar rupiah di tahun 2021 menjadi 687.609,5 miliar rupiah pada 2022, dan terus naik menjadi 742.264,5 miliar rupiah pada tahun 2023. Sedangkan Cukai menunjukkan tren peningkatan moderat, dari 195.517,8 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 226.880,8 miliar rupiah pada 2022, dan mencapai 227.210 miliar rupiah pada 2023. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencatat kontribusi lebih kecil. PBB naik dari 18.924,8 miliar rupiah (2021) menjadi 25.462,7 miliar rupiah (2023), sementara BPHTB tidak mencatatkan realisasi dalam ketiga tahun tersebut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan negara sangat bergantung pada sektor perpajakan, terutama pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kenaikan yang konsisten mencerminkan perbaikan dalam kepatuhan pajak, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan basis pajak nasional.

Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun adalah sulitnya mencapai, bahkan melewati target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut menyebabkan beberapa sektor sulit untuk berkembang karena kurangnya modal dari pajak negara. Berikut merupakan perkembangan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun.



Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Indonesia Tahun ke Tahun

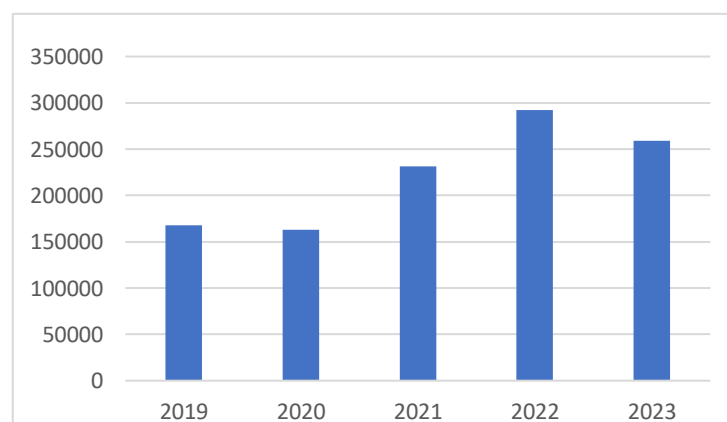
Sumber: BPS (data diolah)

Data realisasi dan target penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan dinamika capaian fiskal negara yang berfluktuasi setiap tahunnya. Dalam periode 2014–2019, realisasi penerimaan pajak secara konsisten berada di bawah target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pada tahun 2014 realisasi mencapai Rp1.146,86 triliun dari target Rp1.246,10 triliun, dan pada 2017 hanya tercapai Rp1.343,52 triliun dari target Rp1.498,90 triliun. Hal ini menunjukkan tantangan pemerintah dalam mencapai target pajak, yang dapat disebabkan oleh perlambatan ekonomi, tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak, serta keterbatasan kapasitas pengawasan dan penagihan oleh otoritas pajak.

Namun, mulai tahun 2020, situasi mulai menunjukkan perbaikan. Meskipun tahun tersebut diwarnai pandemi COVID-19, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.285,13 triliun berhasil melebihi target sebesar Rp1.198,80 triliun. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana realisasi penerimaan pajak mencapai Rp2.118,34 triliun, melampaui target sebesar Rp1.818,30 triliun. Kinerja positif

dalam beberapa tahun terakhir ini mencerminkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, efektivitas reformasi perpajakan, serta dorongan dari pemulihan ekonomi pascapandemi. Meski demikian, catatan historis menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih realistis dan penguatan sistem perpajakan untuk memastikan target penerimaan dapat tercapai secara berkelanjutan. Selain itu, hal ini dapat mencerminkan berbagai faktor seperti faktor-faktor makroekonomi seperti ekspor, investasi, dan inflasi Setyawan (2021).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, sektor ekspor memegang peranan yang cukup strategis. Kegiatan ekspor tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Ketika volume ekspor meningkat, perusahaan eksportir cenderung memperoleh laba yang lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan setoran pajak penghasilan (PPh) ke negara. Semakin tinggi ekspor, produsen akan berkonsentrasi untuk membuat produk dan jasa yang ditujukan untuk pasar ekspor. Hal ini dapat menyebabkan pasokan dalam negeri berkurang Puspasari & Gazali (2022).

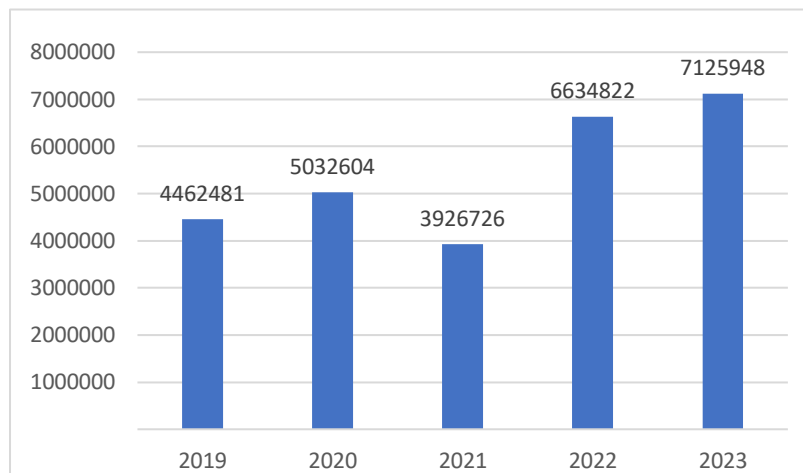


Gambar 1. 2 Ekspor Indonesia Tahun 2019-2023 (Juta USD)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Data ekspor Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 dalam satuan juta USD menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2019, nilai ekspor tercatat sebesar 167.683 juta USD dan sedikit menurun di tahun 2020 menjadi 163.192 juta USD, kemungkinan akibat dampak pandemi global. Namun, pada tahun 2021 ekspor melonjak tajam menjadi 231.610 juta USD dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya di tahun 2022 sebesar 291.904 juta USD. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 258.774 juta USD, nilai ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum 2021, mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan yang kuat dalam sektor ekspor Indonesia, baik migas maupun nonmigas.

Investasi menjadi komponen penting lainnya yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Investasi dalam bentuk modal lokal berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Suhendra dan Istikomah (2016) menunjukkan bahwa iklim investasi dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan suku bunga. Inflasi yang terkontrol dengan baik, serta tingkat suku bunga yang kompetitif, cenderung meningkatkan minat investasi, terutama pada investasi portofolio. Namun, inflasi yang tinggi bersama dengan suku bunga yang meningkat dapat menurunkan minat investor. Hal ini secara langsung mengurangi basis pajak dari aktivitas ekonomi, karena jumlah perusahaan dan proyek baru yang beroperasi semakin berkurang, serta menurunkan potensi penerimaan pajak dari investasi yang terjadi Suhendra & Istikomah (2016).



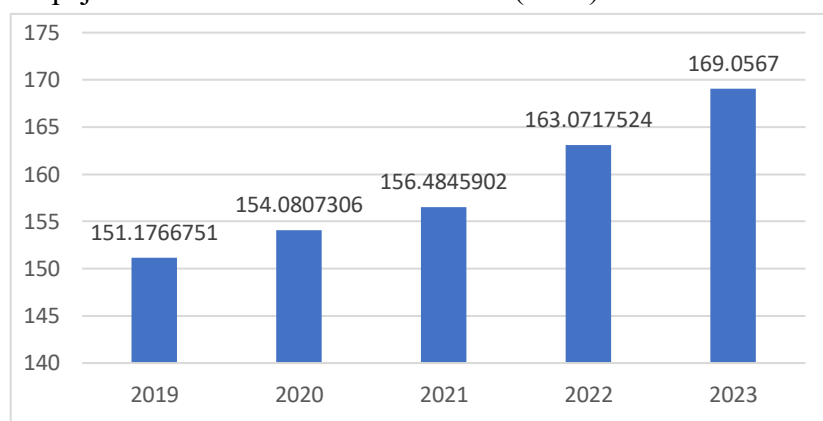
Gambar 1. 3 Investasi Indonesia Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Data investasi Indonesia dalam satuan Juta Rupiah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan respons terhadap dinamika global dan domestik. Pada 2019, investasi mencapai 4.462.481 Juta Rupiah dan meningkat pada 2020 menjadi 5.032.604 Juta Rupiah meskipun terjadi pandemi COVID-19, yang mengindikasikan adanya kepercayaan investor terhadap kebijakan penanganan krisis. Namun, pada 2021 investasi menurun tajam menjadi USD 3.926.726 Juta Rupiah, kemungkinan disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi lanjutan serta pembatasan aktivitas. Pemulihan mulai terlihat pada 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 6.634.822 Juta Rupiah dan 7.125.948 Juta Rupiah, mencerminkan perbaikan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi pascapandemi, dan penguatan kebijakan hilirisasi serta reformasi struktural.

Inflasi juga menjadi faktor penting yang berdampak pada daya beli dan stabilitas ekonomi. Inflasi yang tinggi tidak hanya mengurangi daya beli masyarakat tetapi juga berdampak pada biaya produksi perusahaan, yang pada gilirannya mempengaruhi laba usaha. Dalam penelitian yang dilakukan Mas'udin

(2017) ditemukan bahwa kenaikan inflasi menyebabkan penurunan penerimaan pajak dari sektor non-migas. Inflasi yang tidak terkendali menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga banyak perusahaan harus menyesuaikan harga produk atau menurunkan kapasitas produksi mereka. Penurunan laba ini menyebabkan basis pajak menjadi lebih kecil, sehingga mengurangi potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut Mas'udin (2017).



Gambar 1. 4 Inflasi Berdasarkan Indeks Harga Konsumen Indonesia Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Data inflasi Indonesia berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2019–2023 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dalam satuan persen. Pada tahun 2019, inflasi berada di angka 151,18 persen, kemudian naik menjadi 154,08 persen pada 2020, 156,48 persen pada 2021, 163,07 persen pada 2022, dan mencapai 169,06 persen pada 2023. Kenaikan dari tahun ke tahun dalam persen masing-masing adalah sekitar 2,90 persen (2019–2020), 2,40 persen (2020–2021), 6,59 persen (2021–2022), dan 5,99 persen (2022–2023). Kenaikan yang relatif tajam pada tahun 2022 dan 2023 mencerminkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, kenaikan harga energi, atau

kondisi global. Secara keseluruhan, dalam periode lima tahun ini, inflasi meningkat sebesar 17,88 persen, mencerminkan bertambahnya tekanan harga terhadap konsumen.

Secara keseluruhan, ketiga faktor utama, yaitu ekspor, investasi, dan inflasi berperan sangat penting dalam mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Ekspor yang meningkat mampu menaikkan pengenaan pajak atas seluruh barang yang dikeluarkan oleh produsen kepada konsumen. Di sisi lain, inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada aktivitas konsumsi dan produksi, dua komponen penting yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ekspor, Investasi, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2004-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti memiliki beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Ekspor, Investasi, dan Inflasi secara parsial terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2004-2023?
2. Bagaimana pengaruh Ekspor, Investasi, dan Inflasi secara simultan terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2004-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian adalah menjawab permasalahan yang ada.

Maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Ekspor, Investasi, dan Inflasi secara parsial terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2004-2023.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Ekspor, Investasi, dan Inflasi secara simultan terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2004-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, manfaat yang diberikan dibagi menjadi dua lingkup, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi publik dan fiskal, dengan menganalisis pengaruh ekspor, investasi, dan inflasi terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Temuan empirisnya memperkaya literatur akademik dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif. Hasilnya diharapkan mendukung optimalisasi penerimaan pajak serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi nasional.

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi referensi bagi pembuat kebijakan seperti pemerintah dan Bank Indonesia untuk merumuskan strategi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih efektif guna meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung stabilitas ekonomi.

[illegible]